Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 183-193
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

Dinamika Kemiskinan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Berdasarkan Indikator BPS 2021–2025

Anif Muchlashin
Prodi Pembangunan Sosial, FISIP, Universitas Mulawarman. Jalan Kuaro, Kampus Gunung Kelua, 75117, Samarinda
e-mail: anifmuchlashin@fisip.unmul.ac.id

Abstrak: Kemiskinan tetap menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan regional yang adil dan berkelanjutan di Indonesia. Meskipun tingkat kemiskinan nasional cenderung menurun, kesenjangan antardaerah masih terlihat akibat perbedaan struktur ekonomi, pasar tenaga kerja, pembangunan manusia, dan kebijakan regional. Di Kalimantan, perbedaan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menarik perhatian. Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita tinggi dan menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara, tetapi tingkat kemiskinannya tetap lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Selatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum selalu menghasilkan pengurangan kemiskinan yang merata. Penelitian ini bertujuan menganalisis tren kemiskinan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan selama 2021–2025, membandingkan karakteristik kemiskinan berdasarkan indikator BPS, serta mengidentifikasi kesenjangan pembangunan yang memengaruhi perbedaan dinamika kemiskinan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif kuantitatif dengan data sekunder BPS periode 2021–2025. Indikator yang dianalisis meliputi angka kemiskinan (P0), Indeks Kesenjangan Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan kemiskinan perkotaan dan perdesaan. Analisis dilakukan melalui perbandingan tren dan statistik deskriptif. Kedua provinsi menunjukkan penurunan kemiskinan, tetapi Kalimantan Timur secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi. Perbedaan tersebut berkaitan dengan distribusi pendapatan, kondisi pasar tenaga kerja, pembangunan manusia, dan struktur ekonomi. Pengentasan kemiskinan memerlukan pembangunan inklusif yang memperluas akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan terpadu, meningkatkan modal manusia, mengurangi kesenjangan, serta menggunakan perencanaan berbasis bukti dan indikator kemiskinan multidimensional. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data panel kabupaten/kota dan analisis ekonometrik. Hal ini penting untuk memastikan kebijakan lebih tepat sasaran dan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Keywords: Kemiskinan; Analisis Komparatif; Kalimantan Timur; Kalimantan Selatan; Pembangunan Regional.

How to Cite: Muchlashin, A. (2026). Dinamika Kemiskinan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Berdasarkan Indikator BPS 2021–2025. Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS, 20(2): 183-193

Copyright © 2026 (Anif Muchlashin)

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan pembangunan yang hingga kini masih menjadi perhatian utama di berbagai negara berkembang. Tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, serta kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi tujuan pertama dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Paradigma pembangunan modern juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menciptakan kesejahteraan yang inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menurunkan kemiskinan apabila peningkatan output tidak diikuti perluasan kesempatan kerja, perlindungan sosial, akses layanan dasar, dan distribusi manfaat pembangunan yang lebih merata. Suryahadi dkk (2021) menunjukkan pentingnya perlindungan sosial dalam menjaga kelompok miskin

dan rentan, sedangkan Andriansyah dkk (2023) menegaskan bahwa perubahan struktural dan peningkatan produktivitas berperan dalam pertumbuhan ekonomi regional. Dalam konteks Indonesia, Handayani dkk (2024) juga menunjukkan bahwa perluasan akses infrastruktur dasar dapat berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Karena itu, pertumbuhan ekonomi perlu dibaca bersama kualitas distribusi dan akses masyarakat terhadap sumber daya pembangunan.

Pada konteks Indonesia berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga reformasi kebijakan fiskal daerah. Meskipun demikian, capaian penurunan kemiskinan masih menunjukkan variasi yang cukup besar antarprovinsi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh struktur ekonomi daerah, kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, pemerataan pembangunan, dan efektivitas kebijakan publik.

Fenomena tersebut juga terlihat di Kalimantan, salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan energi. Penetapan Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) turut meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur. Namun, data BPS menunjukkan bahwa meskipun persentase penduduk miskin Kalimantan Timur menurun dari 6,54% pada 2021 menjadi 5,78% pada 2024, tingkatnya tetap lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Selatan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa PDRB per kapita dan aktivitas ekonomi yang tinggi belum otomatis menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah.

Temuan terdahulu mendukung pentingnya melihat kemiskinan melalui berbagai dimensi pembangunan. Hitayah dkk (2024) menunjukkan keterkaitan pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, pembangunan manusia, dan kemiskinan di Kalimantan Timur. Fadhlani dkk (2024) juga menemukan bahwa garis kemiskinan menjadi salah satu determinan penting jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur. Pada Kalimantan Selatan, Sephia dan Chandriyanti (2024), Hayati dan Chandriyanti (2025), serta Wahidah dan Saleh (2025) menunjukkan bahwa pendidikan, pengangguran, kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan dinamika kemiskinan. Temuan-temuan tersebut menguatkan perlunya analisis yang tidak berhenti pada pertumbuhan ekonomi semata.

Peneliti melihat pada sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada analisis determinan kemiskinan dalam satu provinsi atau menggunakan pendekatan ekonometrika untuk menguji pengaruh beberapa variabel terhadap kemiskinan. Kajian komparatif yang membandingkan dinamika kemiskinan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir masih relatif terbatas. Padahal, kedua provinsi memiliki karakteristik geografis yang berdekatan, struktur ekonomi yang relatif serupa karena sama-sama ditopang sektor pertambangan dan perkebunan, tetapi menghadapi konteks pembangunan yang berbeda, terutama sejak dimulainya pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.

Melihat pada penelitian sebelumnya umumnya menggunakan persentase penduduk miskin (P0) sebagai indikator utama. Pendekatan tersebut belum mampu menggambarkan karakteristik kemiskinan secara lebih komprehensif, seperti kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*/P1), keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*/P2), garis kemiskinan, maupun keterkaitannya dengan indikator pembangunan lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia, Gini Ratio, dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita. Padahal, indikator-indikator tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai karakteristik kemiskinan di masing-masing provinsi.

Peneliti melakukan analisis komparatif melalui dinamika kemiskinan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan menggunakan data resmi Badan Pusat Statistik selama periode 2021–2025. Penelitian ini tidak hanya membandingkan persentase penduduk miskin, tetapi juga mengkaji indikator-indikator kemiskinan lainnya sehingga diharapkan mampu menjelaskan mengapa provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lebih tinggi belum tentu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pembangunan sosial sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam

Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 183-193
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis bukti.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif untuk menganalisis dinamika kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan selama 2021–2025. Data sekunder bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), BPS Provinsi Kalimantan Timur, dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan, terutama publikasi tahun 2025 yang memuat deret indikator beberapa tahun sebelumnya. Periode pengamatan menggunakan data September tahun 2021–2025.

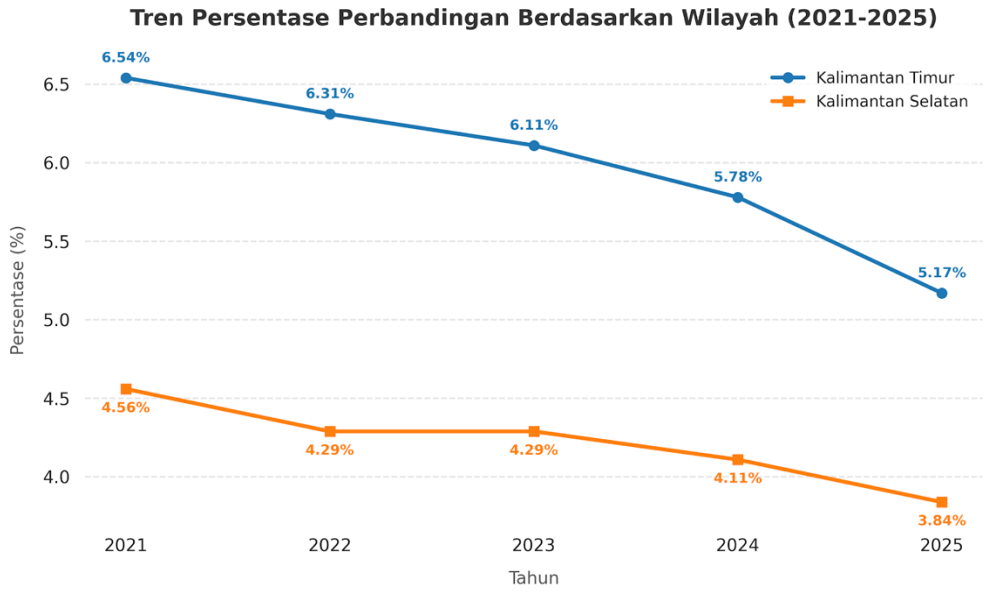
Indikator yang dianalisis meliputi persentase penduduk miskin (P0), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin, serta kemiskinan perkotaan dan perdesaan. Garis kemiskinan BPS digunakan sebagai batas kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.

Analisis dilakukan melalui tabel, grafik, perbandingan nilai kedua provinsi pada tahun yang sama, serta perubahan awal–akhir periode. Data diperiksa berdasarkan tahun, satuan, definisi indikator, dan periode pengamatan sebelum dibandingkan. Interpretasi digunakan untuk menggambarkan pola, persamaan, dan perbedaan kemiskinan serta keterkaitannya secara deskriptif dengan kondisi pembangunan; penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat antarvariabel.

Hasil

Perbandingan Tren Tingkat Kemiskinan

Gambar 1 Perbandingan Angka Kemiskinan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

BPS Kalimantan TimurGambar 1 menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di kedua provinsi menurun selama 2021–2025. Kalimantan Timur turun dari 6,54% menjadi 5,17% (1,37 persen poin atau sekitar 20,95%), sedangkan Kalimantan Selatan turun dari 4,56% menjadi 3,84% (0,72 persen poin atau sekitar 15,79%). Kalimantan Timur tetap memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi, tetapi selisih antardaerah menyempit dari 1,98 persen poin pada 2021 menjadi 1,33 persen poin pada 2025.

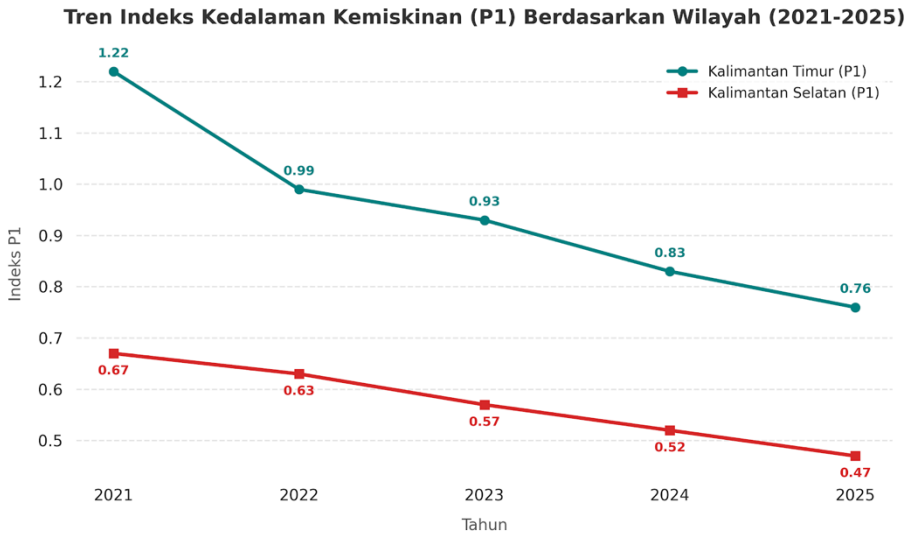
Penyempitan kesenjangan menunjukkan penurunan kemiskinan Kalimantan Timur berlangsung lebih cepat, meskipun levelnya masih di atas Kalimantan Selatan. Temuan ini penting karena Kalimantan Timur memiliki PDRB per kapita tinggi dan menjadi lokasi pembangunan IKN. Secara

Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 183-193
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

deskriptif, pola tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum selalu diikuti distribusi manfaat yang merata. Hal ini selaras dengan Andriansyah dkk (2023) mengenai pentingnya kualitas perubahan struktural bagi pertumbuhan regional serta dengan temuan Merdikawati dan Al Izzati (2025) bahwa instrumen pasar kerja tidak selalu secara langsung menghasilkan penurunan kemiskinan rumah tangga.

Kedalaman Kemiskinan

Gambar 2 Perbandingan Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

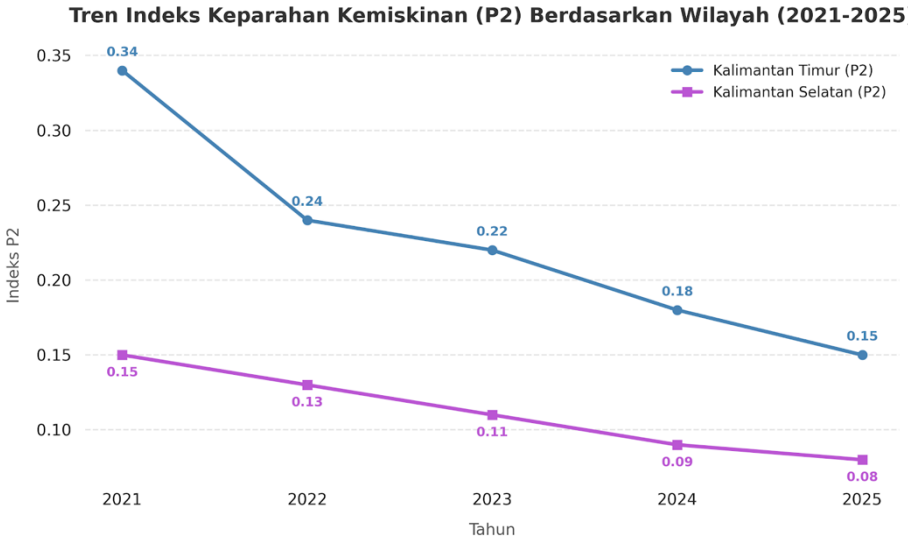
Gambar 2 menunjukkan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di kedua provinsi. Kalimantan Timur turun dari 1,22 pada 2021 menjadi 0,76 pada 2025 (turun 0,46 poin atau sekitar 37,7%), sedangkan Kalimantan Selatan turun dari 0,67 menjadi 0,47 (turun 0,20 poin atau sekitar 29,9%). Selisih P1 menyempit dari 0,55 menjadi 0,29 poin, tetapi nilai Kalimantan Timur tetap lebih tinggi pada seluruh periode.

Penurunan P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Secara deskriptif, perbaikan Kalimantan Timur berlangsung lebih cepat, sementara Kalimantan Selatan mempertahankan kedalaman kemiskinan yang lebih rendah. Interpretasi ini konsisten dengan pendekatan pengukuran kemiskinan BPS (2025) yang tidak hanya memperhatikan persentase penduduk miskin, tetapi juga kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kajian Arimi dkk (2025) juga menekankan perlunya membaca kemiskinan secara multidimensional agar perbedaan kerentanan antarkelompok dan antarwilayah dapat terlihat lebih utuh.

Keparahan Kemiskinan

Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 183-193
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

Gambar 3 Perbandingan Keparahan Kemiskinan (P2) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan



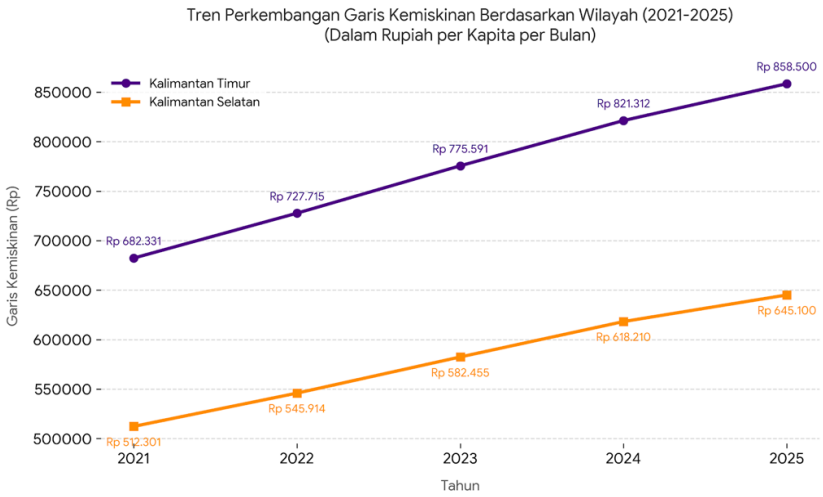
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Gambar 3 memperlihatkan penurunan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada kedua provinsi. Kalimantan Timur turun dari 0,34 pada 2021 menjadi 0,15 pada 2025 (0,19 poin atau sekitar 55,9%), sedangkan Kalimantan Selatan turun dari 0,15 menjadi 0,08 (0,07 poin atau sekitar 46,7%). Selisih P2 menyempit dari 0,19 menjadi 0,07 poin, namun Kalimantan Timur tetap berada di atas Kalimantan Selatan.

Penurunan P2 menunjukkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin kecil. Kalimantan Timur mengalami perbaikan lebih cepat, sedangkan Kalimantan Selatan mempertahankan tingkat keparahan yang lebih rendah. Dalam kajian kemiskinan kontemporer, indikator keparahan penting karena menggambarkan ketimpangan di dalam kelompok miskin, bukan hanya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Arimi dkk (2025) menunjukkan bahwa deprivasi dan kerentanan kemiskinan perlu dianalisis secara lebih komprehensif, sedangkan Irawan dkk (2025) memperlihatkan bahwa faktor pembangunan manusia dan pengeluaran per kapita berkaitan dengan variasi kemiskinan antardaerah di Kalimantan Selatan.

Garis Kemiskinan

Gambar 4 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

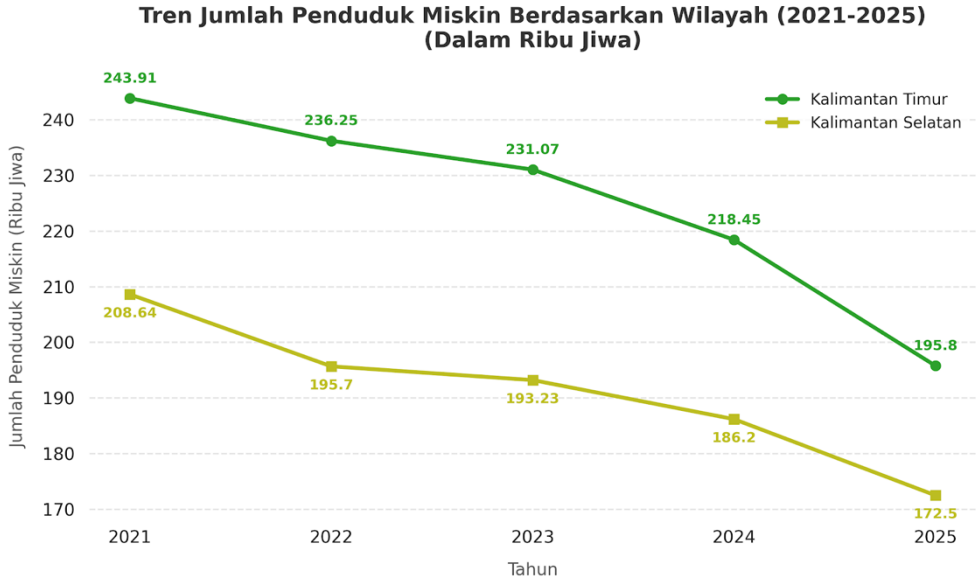
Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 183-193
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

Gambar 4 menunjukkan bahwa garis kemiskinan meningkat di kedua provinsi selama 2021–2025. Kalimantan Timur meningkat dari Rp682.331 menjadi Rp866.193 per kapita per bulan, sedangkan Kalimantan Selatan dari Rp512.301 menjadi Rp646.697. Selisih garis kemiskinan juga melebar, dari sekitar Rp170 ribu pada 2021 menjadi lebih dari Rp219 ribu pada 2025.

Kenaikan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nilai yang konsisten lebih tinggi di Kalimantan Timur membantu menjelaskan mengapa tekanan ekonomi kelompok berpendapatan rendah tetap besar meskipun PDRB per kapita tinggi. Interpretasi ini sesuai dengan pendekatan kebutuhan dasar BPS, yang membentuk garis kemiskinan dari kebutuhan makanan dan nonmakanan.

Jumlah Penduduk Miskin

Gambar 5 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

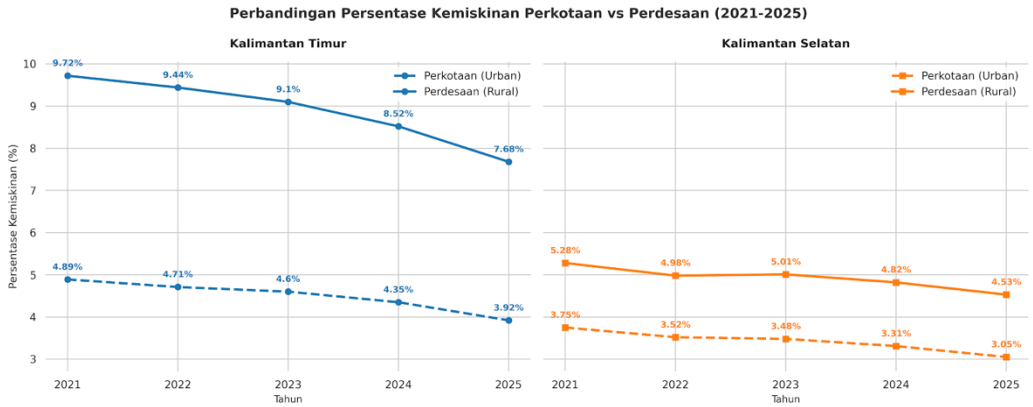
Gambar 5 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin menurun pada kedua provinsi. Kalimantan Timur turun dari 243,91 ribu jiwa pada 2021 menjadi 201,89 ribu jiwa pada 2025, sedangkan Kalimantan Selatan turun dari 208,64 ribu menjadi 181,12 ribu jiwa. Selisih jumlah penduduk miskin juga mengecil, sehingga penurunan absolut Kalimantan Timur lebih besar selama periode pengamatan.

Pola ini konsisten dengan penurunan P0, P1, dan P2. Meski Kalimantan Timur masih memiliki jumlah penduduk miskin lebih banyak, laju penurunannya menunjukkan perbaikan yang lebih cepat. Kajian terkini di Indonesia menunjukkan bahwa pengurangan kemiskinan membutuhkan kombinasi pertumbuhan, akses infrastruktur, dan penguatan pasar kerja. Handayani dkk. (2024) menemukan kontribusi akses listrik yang andal terhadap pengurangan kemiskinan, sedangkan Merdikawati dan Al Izzati (2025) menunjukkan bahwa perbaikan pendapatan pekerja tidak selalu serta-merta mengubah status kemiskinan rumah tangga. Artinya, manfaat pertumbuhan perlu menjangkau kelompok berpendapatan rendah melalui berbagai saluran pembangunan.

Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 183-193
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI

Gambar 6 Perbandingan Kemiskinan di Perkotaan dan Perdesaan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

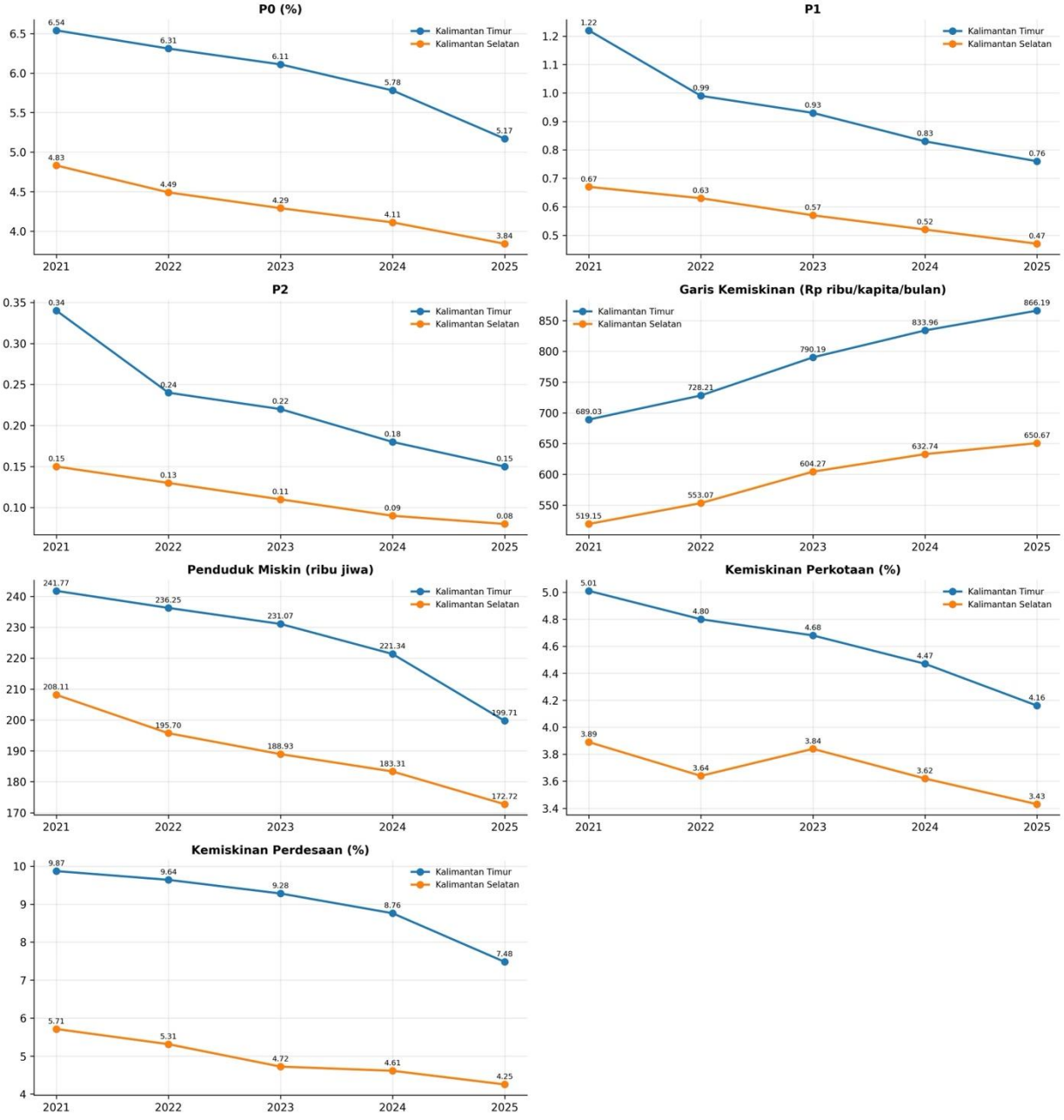
Gambar 6 menunjukkan bahwa kemiskinan perkotaan dan perdesaan menurun di kedua provinsi selama 2021–2025, tetapi kemiskinan perdesaan tetap lebih tinggi. Di Kalimantan Timur, kemiskinan perdesaan turun dari 9,72% menjadi 7,89%, sedangkan perkotaan dari 5,38% menjadi 4,37%. Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan dengan tingkat yang lebih rendah pada kedua wilayah.

Perbandingan wilayah memperlihatkan kemiskinan Kalimantan Timur lebih terkonsentrasi di perdesaan. Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat belum sepenuhnya menjangkau wilayah perdesaan dengan intensitas yang sama seperti perkotaan, terutama ketika kegiatan ekonomi utama lebih terkonsentrasi pada sektor dan lokasi tertentu.

Secara deskriptif, perbedaan kemiskinan perkotaan dan perdesaan menunjukkan adanya dimensi spasial dalam proses pembangunan. Ro'fah dkk (2023) memperlihatkan bahwa kemiskinan perdesaan berkaitan dengan faktor struktural maupun kondisi rumah tangga, sementara Janssen dkk (2022) menunjukkan bahwa pemisahan spasial kelompok kaya dan miskin di wilayah perkotaan dipengaruhi oleh karakteristik lokasi dan lingkungan. Dalam penelitian ini, pola wilayah hanya dibaca berdasarkan indikator BPS dan tidak digunakan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara struktur sektoral dan kemiskinan.

Gambar 7 Perbandingan Kemiskinan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Secara Keseluruhan

Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS (JPPI)
20(2): 183-193
http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JPPI



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026

Secara keseluruhan, Gambar 7 menegaskan pola yang konsisten: P0, P1, P2, dan jumlah penduduk miskin menurun di kedua provinsi, sementara garis kemiskinan meningkat. Kalimantan Selatan mempertahankan tingkat kemiskinan yang lebih rendah, sedangkan Kalimantan Timur menunjukkan penurunan yang lebih cepat pada beberapa indikator. Pada dimensi wilayah, kemiskinan perdesaan tetap lebih tinggi daripada perkotaan, terutama di Kalimantan Timur.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya PDRB per kapita Kalimantan Timur belum diikuti oleh tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Kalimantan Selatan. Sepanjang 2021–2025, P0 Kalimantan Timur tetap lebih tinggi. Pola ini memperlihatkan bahwa besarnya output ekonomi tidak cukup digunakan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Kondisi tersebut dapat dibaca sebagai paradoks pertumbuhan dan kemiskinan: Kalimantan Timur ditopang sektor pertambangan, investasi, dan pembangunan IKN, tetapi manfaat ekonomi belum seluruhnya tercermin pada indikator kemiskinan. Temuan ini konsisten dengan Andriansyah dkk (2023) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan regional bergantung pada perubahan struktural dan produktivitas, serta Fadhlani dkk (2024) yang menemukan bahwa kenaikan PDRB per kapita di Kalimantan Timur tidak secara parsial menunjukkan pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dalam model yang mereka gunakan. Dengan demikian, besarnya output ekonomi perlu dibaca bersama karakteristik pasar kerja, biaya hidup, dan distribusi manfaat pembangunan.

Indikator P1 dan P2 memperkuat temuan tersebut. Nilai kedalaman dan keparahan kemiskinan Kalimantan Timur tetap lebih tinggi, meskipun penurunannya lebih cepat. Artinya, selain jumlah penduduk miskin yang lebih besar, rata-rata jarak pengeluaran terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan di dalam kelompok miskin juga masih lebih besar dibandingkan Kalimantan Selatan. Arimi dkk (2025) menegaskan bahwa pengukuran kemiskinan multidimensional dapat mengungkap bentuk deprivasi yang tidak tertangkap oleh ukuran pendapatan semata. Karena itu, pembacaan P0, P1, dan P2 secara bersamaan lebih informatif daripada hanya menggunakan persentase penduduk miskin.

Aspek lain yang menarik adalah tingginya garis kemiskinan di Kalimantan Timur. Sepanjang periode penelitian, garis kemiskinan Kalimantan Timur selalu berada di atas Kalimantan Selatan. Menurut pendekatan kebutuhan dasar BPS (2025), garis kemiskinan merepresentasikan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan. Maharani, Irsyad, dan Ibrahim (2026) juga menunjukkan tren kenaikan garis kemiskinan di Kalimantan Timur dan menilai pola tersebut cukup kuat untuk digunakan dalam peramalan. Dengan demikian, perbedaan garis kemiskinan antarwilayah perlu diperhatikan saat membandingkan kondisi kelompok berpendapatan rendah.

Dari perspektif spasial, penelitian ini juga menemukan bahwa kemiskinan di Kalimantan Timur lebih tinggi di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan. Pola tersebut menunjukkan bahwa manfaat pembangunan belum tersebar dengan intensitas yang sama antarwilayah. Ro'fah dkk (2023) menggambarkan kemiskinan perdesaan sebagai persoalan yang dipengaruhi faktor internal dan struktural, sedangkan Sijabat (2024) menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, dana desa, kemiskinan, dan pembangunan manusia di berbagai provinsi Indonesia. Temuan ini mendukung pentingnya pemerataan infrastruktur, layanan dasar, produktivitas ekonomi lokal, dan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Apabila seluruh indikator dianalisis secara simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kalimantan Timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan Kalimantan Selatan. Kalimantan Timur menghadapi kemiskinan berbiaya hidup tinggi, yaitu kondisi ketika garis kemiskinan yang tinggi menyebabkan kelompok masyarakat rentan lebih mudah masuk ke dalam kategori miskin. Selain itu, struktur ekonomi yang bergantung pada sektor ekstraktif menyebabkan pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan kesempatan kerja yang inklusif. Sebaliknya, Kalimantan Selatan menunjukkan karakteristik kemiskinan yang lebih terkendali, ditandai oleh nilai P0, P1, dan P2 yang lebih rendah, garis kemiskinan yang lebih rendah, serta kesenjangan wilayah yang relatif kecil. Temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas distribusi pendapatan, struktur ekonomi, biaya hidup, serta pemerataan pembangunan wilayah.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini konsisten dengan literatur mutakhir bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting, tetapi tidak cukup untuk menurunkan kemiskinan secara efektif. Suryahadi dkk (2021) menekankan peran perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan

rentan, Handayani dkk (2024) menunjukkan pentingnya akses infrastruktur dasar, dan Merdikawati dan Al Izzati (2025) memperlihatkan keterbatasan satu instrumen pasar kerja dalam mengubah status kemiskinan rumah tangga. Pada konteks Kalimantan, Hayati dan Suherty (2025), Hayati dan Chandriyanti (2025), serta Irawan dkk. (2025) memperkuat pentingnya pembangunan manusia, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran per kapita. Karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif, penciptaan kerja produktif, peningkatan kualitas SDM, perlindungan sosial adaptif, dan pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa selama 2021–2025 Kalimantan Selatan secara konsisten memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur berdasarkan P0, P1, P2, jumlah penduduk miskin, dan dimensi perkotaan-perdesaan. Namun, Kalimantan Timur mengalami penurunan yang lebih cepat pada beberapa indikator sehingga kesenjangan antardaerah cenderung menyempit. Pada saat yang sama, garis kemiskinan meningkat di kedua provinsi dan tetap lebih tinggi di Kalimantan Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu disertai pemerataan manfaat pembangunan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, dan perhatian pada kesenjangan wilayah. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan data panel kabupaten/kota dan analisis ekonometrik untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan dinamika kemiskinan secara lebih kuat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada FISIP Universitas Mulawarman atas dukungan terhadap penyusunan dan diseminasi hasil penelitian ini.

Referensi

Arimi, S., Harmaini, & Hafdhallah, H. (2025). Measurement and decomposition of multidimensional poverty in Indonesian. Inovasi Pembangunan: *Jurnal Kelitbangan.* 13(1). https://doi.org/10.35450/jip.v13i01.1056

Andriansyah, Nurwanda, A., & Rifai, B. (2023). Structural change and regional economic growth in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 59(1), 91–117. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1914320

Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2025*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2025). *Kalimantan Selatan dalam angka 2025*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2025). *Kalimantan Timur dalam angka 2025*. BPS Provinsi Kalimantan Timur.

Fadhlani, M. F., Irawan, T., & Priyarsono, D. S. (2024). Determinants of poverty in East Kalimantan: A panel data approach. COSTING: *Journal of Economic, Business and Accounting*. 7(5).

Handayani, P. W., Nasrudin, R., & Rezki, J. F. (2024). Reliable electricity access, micro and small enterprises, and poverty reduction in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 60(1), 35–66. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2175782

Hayati, N., & Chandriyanti, I. (2025). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 8(1), 218–230. https://doi.org/10.20527/jiep.v8i1.616

Hayati, N. A., & Suherty, L. (2025). Pengaruh jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota Provinsi Kalimantan

Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 8(2), 455–466. https://doi.org/10.20527/jiep.v8i2.682

Hitayah, F., Effendi, A. S., & Awaluddin, M. (2024). The effect of economic growth and inflation and unemployment rate on human development index and poverty in East Kalimantan Province. *International Journal of Economics, Commerce, and Management*. 1(4), 82–92. https://doi.org/10.62951/ijecm.v1i4.195

Irawan, A., Wati, H., Salam, N., & Asianingrum, A. H. (2025). Analisis regresi panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan tahun 2018–2022. RAGAM: Journal of Statistics & Its Application, 4(2). https://doi.org/10.20527/ragam.v4i2.15871

Janssen, K. M. J., Mulder, P., & Yudhistira, M. H. (2022). Spatial sorting of rich versus poor people in Jakarta. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 58(2), 167–194. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1876209

Maharani, A. P., Irsyad, A., & Ibrahim, M. R. (2026). Application of double exponential smoothing Holt's method for poverty line forecasting (Study case: East Kalimantan Province). *Ultimatics: Jurnal Teknik Informatika*. 17(2), 176–183. https://doi.org/10.31937/ti.v17i2.4349

Merdikawati, N., & Al Izzati, R. (2025). Minimum wage policy and poverty in Indonesia. *The World Bank Economic Review.* 39(1), 191–210. https://doi.org/10.1093/wber/lhae022

Ro'fah, Hanjarwati, A., & Suprihatiningrum, J. (2023). Revealing the faces of rural poverty in Indonesia: A case from Temanggung, Central Java. *Jurnal Sosiologi Reflektif*. 17(2), 549. https://doi.org/10.14421/jsr.v17i2.2758

Sephia, S., & Chandriyanti, I. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, rata-rata lama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 7(2), 506–513. https://doi.org/10.20527/jiep.v7i2.220

Sijabat, R. (2024). Impact of economic growth, village funds, and poverty on human development in Indonesia: An analytical study from 2015 to 2022. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*. 11(3), 238–250. https://doi.org/10.21833/ijaas.2024.03.023

Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The impact of Covid-19 and social protection programs on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 57(3), 267–296. https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519

Wahidah, W., & Saleh, M. (2025). Pengaruh kesempatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan periode 2008–2022. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. 8(2), 398–407. https://doi.org/10.20527/jiep.v8i2.433